



**Gubernur  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **Orasi Kebangsaan**

## **DENGAN JIWA PANCASILA KITA TEGUHKAN SEMANGAT KEBANGSAAN**

**Ikrar Pancasila  
PERINGATAN LAHIRNJA PANTJA SILA  
GERAKAN RAKYAT PANCASILA  
Pagelaran Kraton Yogyakarta, 1 Juni 2017**

**MESKI** penting, Pancasila tidak cukup hanya dengan menggelorakan “*Ikrar*”, tetapi harus diamalkan dalam peri kehidupan oleh setiap Warga Negara Indonesia. Demikian juga, kita tidak cukup dengan meneriakkan slogan “*Pancasila Sudah Final*”, atau “*NKRI Harga Mati*” saja (*necessary but not sufficient*).

Namun, momentum hari ini sejatinya ingin menggugah ingatan kita, bahwa Pancasila adalah *Jiwa Bangsa*. Bung Karno menyebutnya *Geest* atau *Roh* yang mampu memperteguh *Semangat Kebangsaan* terhadap pengaruh apa pun yang mengingkari Pancasila sebagai *Dasar Negara* serta *Ideologi* dan *Pandangan Hidup Bangsa*.

### **Trilogi Bung Karno**

Jauh sebelum pidato “Lahirnja Pantja Sila”, tahun 1932 Bung Karno sudah mengingatkan tentang *Kemerdekaan Geest* ini sebagai berikut:

“...*Kita poenja perdjoangan dalam hakekatnja ialah Perdjoangan Roh; ia ialah Perdjoangan Semangat, ia ialah Perdjoangan Geest...Sebagaimana Sang Koembakarna masih hidoep menggeloendoeng walaoe soedah terlepas dari badannya, maka Geest atau Semangatnja manoesia tidak dapat dibinasakan poela*”.

Oleh sebab itu, Bung Karno pun berpesan: “*Perdjoangankoe lebih moedah karena mengoesir penjajah, perjoanganmoe akan lebih soelit karena melawan bangsamoe sendiri*”. Memang jauh berbeda perjuangan para Pendiri Bangsa dulu dengan perjuangan kita sekarang ini.

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dua dimensi nilai-nilai ideal dan aktual. Namun nilai-nilai itu kini dipengaruhi oleh nilai-nilai neo-liberalisme, yang bersamaan dengan globalisasi informasi juga ditumpangi oleh paham radikalisme agama sebagai *free-rider* yang menariknya ke ranah politik identitas. Bahkan menurut riset Ifa Hanifah Misbach, 9,8% siswa SMA Indonesia menyetujui gerakan ISIS. Kita jangan mensepelekan jumlah ini, dan jangan kaget jika tiba-tiba datanya melejit, apalagi jika sebagian adalah kader-kader militan yang tunduk-patuh kepada peminanya.

Kini, kita rasakan adanya kesenjangan nilai-nilai ideal dengan nilai-nilai aktual. Buktinya, meski mengakui Pancasila, namun ada kelompok masyarakat yang dipandu oleh nilai-nilai luar, seperti materialisme, konsumerisme, egoisme, hedonisme, primordialisme, dogmatisme, atau radikalisme. Nilai-nilai inilah yang diyakininya sesuai sebagai paham negara Indonesia, sehingga akan merusak sistem kenegaraan kita yang dengan susah-payah kita bangun bersama.

Dengan memahami tentang *Kemerdekaan Geest* itu, maka paham yang menolak Pancasila juga tidak cukup hanya berhenti dengan pelarangannya saja. Tetapi Pemerintah harus menerapkan gagasan Bung Karno tahun 1932 yang lain tentang *Trilogie* berkelanjutan: “*Nationale Geest-Nationale Wil-Nationale Daad*”. Dimana para penyelenggara negara harus menerapkan Pancasila sebagai *Jiwa Bangsa* ke dalam segala perundang-undangan dan peraturan dari tingkat Pusat hingga Desa. Untuk itu, memerlukan *Political Will* penerapannya ke dalam program dan penganggaran, agar mampu menggerakkan kegiatan dalam bentuk *Collective Action* massa sebagaimana Gerakan Rakyat Pancasila ini.

### **Akar Masalah Makro: Amandemen UUD 1945**

Kalau kita cermati, ternyata sumber dari segala sumber rapuhnya Pancasila sebagai Dasar Negara pada substansi hukum yang paling mendasar, yaitu UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali. Melalui analisis yang mendalam oleh Kaelan tahun 2013, ditemukan adanya penyimpangan jiwa Pancasila.

“...hasil amandemen ayat (2) ...tidak koheren dengan jiwa Pancasila dan Pembukaan UUD 1945...Jikalau kedaulatan rakyat berhenti hanya pada Presiden, dan DPR, maka tujuan Negara tentang kesejahteraan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Alinea IV dan Sila Kelima mustahil akan terwujud. Bahkan sebaliknya sebenarnya kekayaan Negara untuk kesejahteraan...hanya untuk realisasi demokrasi”.

Kepingan-kepingan kegelisahan dan keprihatinan atas rapuhnya Pancasila sebagai dasar negara dan menipisnya Semangat Kebangsaan itu terus menggumpal dan menggulir. Dampaknya, akhir-akhir ini telah menyemaikan virus sangat berbahaya dan mematikan yang secara subur menginfeksi benak dan pikiran kita. Virus-virus tersebut adalah *pesimisme*, *apatisme*, dan *fatalisme* yang berujung pada *politik indentitas berwajah agama* yang menafikan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Seakan-akan setiap jalan itu adalah *one-way traffic*, sehingga siapa pun pengendara yang berlawanan arah sah hukumnya untuk dilibas habis.

*Pesimisme*, menginfeksi dan menurunkan daya kekebalan semangat kolektivitas kita sebagai bangsa untuk menyongsong tantangan kompetisi terbuka, dan hegemoni bangsa lain dalam gerak gelombang besar globalisasi. *Apatisme*, menginfeksi daya kebanggaan jatidiri kita sebagai warga bangsa, menjadikan “*kita anonim*” di tengah kerumunan saudara-saudara kita sendiri, dimana kita tidak peduli lagi pada lingkaran-lingkaran di luar diri dan kelompok kita. Virus ketiga yang sangat mematikan adalah *fatalisme*, yang menggerogoti dan melumpuhkan tendon dan saraf semangat keIndonesiaan kita.

Bertolak dari kondisi itu, tantangan kita adalah mewujudkan semangat Pancasila dan UUD 1945 setelah UUD 1945 secara yuridis formal mengalami perombakan, sehingga tak lagi mencerminkan jatidiri bangsa. Kini, muncul kesadaran untuk kembali pada jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945, bersamaan dengan menguatnya gugatan terhadap neo-liberalisme dan politik indentitas. Karena itu, sebaiknya meninjau ulang Amandemen UUD 1945 untuk menciptakan landasan hukum yang lebih murni dan konsekuen guna mengatur kehidupan kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah.

### **Akar Masalah Mikro: Keadilan Sosial**

Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah serta pandangan hidup bangsa, yang di dalamnya terkandung nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh sebab itu, kita wajib ‘*menghidupi dan membadankan*’ Pancasila, untuk kemudian, ‘*menginternalisasi*’, ‘*membumikan*’, dan ‘*menggerakkan*’-nya, sehingga menjadi sumber kebijakan dan perilaku masyarakat.

Sejak di hulu, Pancasila seharusnya menjadi substansi setiap kebijakan dan peraturan, mulai dari tingkat tertinggi sampai pada tingkat terendah. Tetapi kini, kondisi politik yang kurang harmonis telah terjadi kemunduran rasa kebersamaan yang bersumber dari semangat gotong-royong, tiadanya penghormatan pada keberagaman, karena para elite terbelah dalam dua kubu yang sulit diakurkan. Rakyat melihat tanpa terlibat dalam pertikaian kaum kelas atas itu, dan hanya tinggal menunggu kapan harus bertindak.

Sebagai produk politik yang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, penetapan Undang-undang sebagai kebijakan publik mestinya harus bermula dari Sila Kelima. Jika kebijakan Presiden “*membangun dari pinggiran*” untuk memperkuat ketahanan nasional, sebagai komplementer dalam *logi* pemerataan sebaiknya dimulai dari “*anak tangga terbawah Pancasila*”. Secara visual, ibarat anak tangga, Sila Kelima terletak paling bawah yang harus ditapaki pertama sebelum melangkah ke atas. Secara sosiologis Keadilan Sosial dalam bidang ekonomi, menjadi tuntutan fundamental. Kesenjangan sosial akan memberi komplikasi rumit dalam berbagai aspek kehidupan lainnya.

Tak terbayangkan kehidupan demokrasi pada Sila Keempat, jika *rasio gini* kian melebar. Tentu kualitas demokrasi akan rendah, karena tidak berbasis pada kesejahteraan ekonomi, apalagi dalam situasi ketidakadilan. Jika pijakan sosial ekonomi dan demokrasi kuat, kegairahan hidup persatuan dalam Sila Ketiga akan menjadi lebih kukuh. Keadilan sosial dan kehidupan yang demokratis akan memperkuat persatuan dan kesatuan berbangsa. Tidak mungkin kemanusiaan akan dihormati, jika tidak adanya keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan.

Jika Sila Kelima, Keempat, dan Ketiga dilaksanakan dengan baik, tangga ke Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, akan tercipta dalam keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan. Empat Sila itu akan membuahkan penghayatan Sila KeTuhanan akan semakin kokoh. Rasa keTuhanan akan rendah, jika orang terus bergulat dalam perdebatan yang tidak demokratis, tidak menghargai persatuan dan kemanusiaan.

Luar biasa ide para Pendiri Bangsa yang telah merumuskan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang menunjukkan arah dan orientasi perjuangan. Selama Pancasila hanya diperalat untuk kepentingan politik, maknanya sebagai ideologi akan merosot dan hambar. Karenanya, terlebih penting bagaimana keinginan itu tidak berhenti pada sekedar wacana atau retorika, tetapi benar-benar dilanjutkan dalam program aksi yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat.

### **Dari Ideologi Ideal ke Ideologi Aktual**

Dalam dialektika ideologi, tidak sulit menjelaskan bila kapitalisme adalah ideologi negara dan bangsa AS atau Eropa Barat. Seseorang yang menganut paham kapitalisme, akan membawa nilai-nilai kebebasan (*freedom*) dan kemenangan kompetisi (*free-fight*) dalam mengaktualisasikan diri. Mengapa ideologi komunis mengakar di Cina, dan Rusia, karena impiannya adalah membangun masyarakat komunal yang sejahtera. Ideologi bangsa tersebut telah mampu menjadi sistem hidup (*belief system*) yang memandu kehidupan sehari-hari bangsanya.

Lalu, melalui ideologi Pancasila ini, bentuk masyarakat manakah yang akan kita bangun?

Tanpa adanya impian masa depan yang akan dicapai, sebuah ideologi akan menjadi *utopis*, dan tidak menarik di dunia yang serba transparan saat ini. Manusia, dalam batasan tertentu adalah makhluk yang *utilitarian*, berharap akan manfaat, dari setiap tindakannya. Oleh karena itu, bila ada rumusan yang jelas dan disosialisasikan secara utuh, Pancasila akan menjadi ideologi yang tumbuh dan hidup di masyarakat Indonesia.

Sehingga kita tidak hanya berhenti pada makna kata "*what is*" Pancasila saja, tetapi menjalankan nilai-nilainya dalam "*what for*", nilai-gunanya, serta "*how-to*" sebagai "*tool*" cara bagaimana menyejahterakan rakyat. Manakala sebuah ideologi bangsa telah memiliki sistematika tertentu, dan bukan hanya mitos, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat akan berperilaku sesuai dengan nilai substantif ideologi bangsanya.

Memang, Pancasila lahir sebagai sebuah ideologi murni yang ideal. Dan sebagai ideologi murni, Pancasila cenderung banyak "*bersarang*" dalam dunia idenya Plato, atau pemikiran teoritik-filsafati. Tidak dipungkiri, seorang filsuf mengajarkan kebaikan sebagai ilmu pengetahuan, tanpa harus membuktikannya seperti dimaksud Bung Karno, *kennis en daad*, yang membuat ilmu menjadi amalan sebagai fakta empirik. Jika kita ingin mengejawantahkan Pancasila menjadi ideologi yang hidup (*living ideology*), dan melekatkan pembudayaan nilai-nilainya lewat jagat pendidikan, perlu membalik paradigma ide menjadi motor penggerak masyarakat, sekaligus landasan persatuan dan kesatuan bangsa guna merespons dinamika perubahan sosial.

### **Dari Ideologi Mitis ke Ideologi Praktis**

Sangat disayangkan, kita memiliki sedikit orang yang memiliki perhatian terhadap tuntutan penerapan Pancasila sebagai ideologi praktis. Prof. Mubyarto, adalah contoh cendekia yang peduli dalam mengembangkan Ekonomi Pancasila. Namun, pemikiran ini miskin responsi dari kalangan intelektual lainnya. Sementara Koentowidjojo pergi dengan meninggalkan sejumlah 'PR' untuk mengembangkan Pancasila sebagai ideologi praktis.

Dengan sedikitnya pemikir dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran mengenai Pancasila ini, wajarlah bila masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam proses implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila perlu ditransformasikan ke bentuk dan model-model aplikatif dalam kehidupan. Pancasila tidak bisa hanya dijadikan ideologi yang berwajah mitis atau politis. Pancasila harus diajak ke bentuk wajah keilmuan. Untuk itu, dibutuhkan kerja ekstra keras dari kalangan pemikir guna menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Kritis.

*Pertama*, dibutuhkan model narasi akademik yang menguatkan makna Pancasila bagi kehidupan bangsa. Jika Soekarno mampu meyakinkan Pancasila adalah ideologi yang riil dan berkesesuaian dengan kebutuhan jaman itu untuk membangkitkan kesadaran nasionalisme, maka setiap anak bangsa saat ini pun perlu ditumbuhkan keyakinan bahwa Pancasila memiliki landasan empirik yang nyata dan logika sah. Andaikan Soekarno telah memancang Pancasila sebagai fundamen bangunan, kitalah yang wajib menyelesaikan sampai terpasang atapnya, yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat.

*Kedua*, Pancasila perlu dikembangkan sebagai metodologi hidup, atau dalam istilah Koentowidjojo dijadikan sebagai Ideologi Praktis. Dalam konteks ini, kita memiliki tanggungjawab untuk menerjemahkannya sebagai pedoman berbangsa dan menjadikannya metode hidup. Dengan kata lain, Pancasila tidak akan bisa membumi, jika tetap hanya dijadikan mitos politis, tanpa memiliki model praktis dalam memecahkan masalah hidup masyarakat.

Dengan menjadikan Pancasila ideologi praktis dan kritis, maka setiap warga memiliki pijakan yang kokoh dan merasa memiliki Pancasila sebagai panduan perilaku mereka. Selain itu, kita dalam suatu rumpun bangsa juga bisa menyelesaikan setiap perbedaan dan konflik dengan landasan nilai-nilainya atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat secara damai dan bermartabat.

### **Catatan Akhir**

Situasi sekarang ini layaknya sebuah pertunjukan wayang kulit, dimana kita tidak mendengar sebuah "*suluk ki Dalang*" yang menyejukkan penuh harmoni, tetapi semua terjebak dalam "*greget saut*" beradu benar dan menangnya sendiri disertai ujaran kebencian. Dalam pentas politik, yang terdengar hanya debat penuh paradoksal, kontroversial, bahkan cenderung vulgar. Saling-silang pernyataan terjadi. Pendapat satu ditimpa yang lain, tetapi tidak menyentuh makna yang substansial. Semua terperjara dalam adegan "*gara-gara*" yang vulgar, melupakan bagaimana mengutamakan Pancasila sebagai basis rekonsiliasi demi kepentingan yang lebih besar bagi bangsa.

Sejak awal, para Pendiri Bangsa menyadari dan mengalami, bahwa membentuk satu negara Republik yang berkepulauan dan melingkari khatulistiwa Nusantara memerlukan satu visi yang jauh ke depan melampaui batas-batas keanekaragaman tata-nilai yang dimiliki oleh suku-suku bangsa kita. Tetapi di tengah globalisasi yang membawa determinasi asing membuat terkikisnya pemaknaan dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Sebuah hasil riset tahun 1995 mengungkapkan, bahwa Indonesia adalah negara yang terlalu meributkan masalah ideologi. Indonesia, terutama para elitnya, sangat peka terhadap masalah ideologi sehingga seringkali terperjara dalam polemik tak berkesudahan.

Lalu, untuk apa dan bagi siapa kita menegakkan Pancasila ketika saudara-saudara kita sendiri justru menggadaikan Pancasila, dan ingin menggantikannya dengan ideologi asing?

Bukankah Sriwijaya, dan Majapahit yang pernah menjadi negara-bangsa yang kuat dan menyatukan, akhirnya surut dan runtuh dari dalam. Kalau *NKRI bukan lagi Harga Mati dan Pancasila justru Mati Suri* dan digantikan ideologi asing, sehingga tak lagi menjadi '*Rumah Kita*' sebab Indonesia tinggal cerita, janganlah ditangisi karena hal itu mungkin saja bisa terjadi menyusul sejarah Sriwijaya dan Majapahit.

Di tengah suburnya tebaran virus dan infeksi itu, Gerakan Rakyat Pancasila terpanggil untuk kembali menyirami dengan air sejuk pegunungan yang membawa kandungan mineral-mineral harapan, bahwa masih ada obat, masih ada jalan keluar dan masih ada Indonesia di masa datang. Mereka ingin menggedor Indonesia, bahwa harapan itu tetap ada, hanya jika kita bersatu dan menyatu dalam tekad untuk mengaktualisasikan Trilogi pesan Bung Karno: "*Geest-Wil-Daad*".

Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk membangkitkan "*Gerak Pancasila*" dari "*Yogya Untuk Indonesia*", seperti halnya "*serangan kejut*" 1 Maret 1949, bukan lagi dengan simbol "*janur kuning*", tetapi "*pita merah-putih*" yang membawa impresi "*Jiwa Pancasila*" dan "*Semangat Kebangsaan*" itu masih hidup di hati Rakyat guna merawat "*NKRI Tetap Lestari*".

Sebuah kegotongroyongan dengan "*semangat nasi bungkus*", wujud solidaritas sosial dan ekspresi kultural, bagaikan ombak besar samudera yang menggelora, seperti halnya aksi massa damai "*Sejuta Rakyat Yogyakarta*" pada 20 Mei 1998, atau kerja-kerja berantai dengan semangat "*golong-gilig*" saat segenap elemen masyarakat membantu korban bencana gempa 27 Mei 2006, dan erupsi Merapi 4 November 2010...

Yogyakarta, 1 Juni 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



**HAMENGKU BUWONO X**